



RENCANA STRATEGIS



**DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029**



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG**

NOMOR : KP.02.02/5023-Dishub/IX/2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra 2025-2029-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
 - b. bahwa dengan telah terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah tahun 2025-2029, maka diperlukan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 maka Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 perlu disesuaikan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Nomor 08 Tahun 2007);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 merupakan landasan bagi unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan 2025-2029 sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 18 September 2025

=====

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Bandung



RASDIAN SETIADI, S.IP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690920 201410 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan	10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	10
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	14
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan	26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	26
2.2.2 Isu Strategis Dinas Perhubungan.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan	39
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	39
3.3 Strategi Renstra Dinas Perhubungan	40
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	45
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	47
4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	63
4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui IKU Dinas Perhubungan	65
BAB V PENUTUP	67

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan	12
Tabel 3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	13
Tabel 4 TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung	18
Tabel 5 TC-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung	22
Tabel 6 TC-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung	40
Tabel 8 TC-27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung	49
Tabel 9 TC-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	61
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan sektor transportasi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan di Kota Bandung. Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama lima tahun ke depan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029. Dokumen ini memiliki peran penting sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Bandung untuk menghadirkan sistem transportasi yang aman, nyaman, ramah lingkungan, serta berdaya saing tinggi.

Berdasarkan ketentuan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025**, Renstra Perangkat Daerah didefinisikan sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun, yang memuat arah pembangunan sektoral sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Renstra juga memuat pengukuran kinerja yang terukur dan terintegrasi dalam kerangka kerja manajemen kinerja instansi pemerintah. Inmendagri nomor 2 tahun 2025 selain merupakan amanat regulasi juga menegaskan bahwa dokumen Renstra harus disusun secara konsisten, terintegrasi, dan berbasis pada hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, serta memperhatikan isu-isu strategis, kebutuhan masyarakat, dan potensi daerah.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah tersebut, sektor transportasi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta urbanisasi yang semakin pesat, Kota Bandung dihadapkan pada berbagai tantangan terkait kemacetan, kualitas infrastruktur, dan kebutuhan transportasi publik yang memadai. Oleh karena itu, perencanaan yang matang

melalui Renstra Dinas Perhubungan ini menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab dinamika tersebut secara efektif dan terukur.

Selanjutnya, Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045, yang menetapkan arah pembangunan dalam dua dekade mendatang. RPJPD menitikberatkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk di dalamnya pengembangan sistem transportasi cerdas yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, Renstra Dinas Perhubungan 2025-2029 berperan sebagai tahapan awal dalam mewujudkan cita-cita jangka panjang tersebut.

Selain itu, penyusunan Renstra ini mempertimbangkan perubahan paradigma dalam perencanaan transportasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya menjadi aspek penting dalam menghasilkan perencanaan yang komprehensif. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan transportasi Kota Bandung yang semakin kompleks di era digitalisasi dan urbanisasi global.

Melalui dokumen ini, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, membangun infrastruktur yang modern dan ramah lingkungan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kota Bandung. Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi wujud nyata dari upaya bersama dalam mencapai pembangunan Kota Bandung yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi yang baik, diharapkan semua program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra ini dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi seluruh warga Kota Bandung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah tahun 2025-2029
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan strategis yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kota Bandung selama periode 5 tahun ke depan.

Renstra ini menjadi dokumen acuan yang memuat arah kebijakan sektoral, khususnya di bidang perhubungan, agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan transportasi di Kota Bandung, seperti peningkatan kemacetan, kebutuhan transportasi publik yang berkualitas, serta pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang modern, inklusif, dan berdaya saing.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan transportasi di Kota Bandung
Menetapkan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang jelas untuk mendukung pembangunan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- b. Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan
Merancang program dan kegiatan yang bertujuan untuk membangun konektivitas antarwilayah, mengembangkan transportasi publik yang efisien, serta memperkuat integrasi antar moda transportasi.
- c. Mengatasi permasalahan transportasi perkotaan
Menyusun kebijakan yang berfokus pada penanganan kemacetan, pengurangan emisi gas buang, serta peningkatan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas.
- d. Mendukung pencapaian RPJMD dan RPJPD Kota Bandung
Mengintegrasikan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

- e. Meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat
Menyediakan layanan transportasi yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung.
- f. Memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan
Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan transportasi perkotaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2025-2029 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi Perangkat Daerah) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, kemudian mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah, uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (Proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih oprasional.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MGD's atau indikator yang telah di ratifikasi oleh pemerintah.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini dikemukakan segmen masyarakat, pelaku usaha, dan institusi yang menjadi penerima manfaat langsung dari kebijakan, program, dan layanan transportasi serta lalu lintas yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta fakto-faktor yang mempengaruhinya.

b. Isu Strategis Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan isu strategis dinas sesuai hasil telaahan visi, misi, program kepala daerah, renstra provinsi, rencana tata ruang wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

Pada bagian ini membahas tentang tujuan operasional yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun, yang dijabarkan dari tujuan

strategis. Sasaran ini menjadi dasar penyusunan indikator kinerja, program, dan kegiatan

3.3 Strategi Renstra Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada bagian ini dikemukakan uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas walikota yang telah ditentukan.

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui IKU Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan pengukuran kinerja Dinas yang ditunjukkan dalam IKU.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Melalui IKK

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sektor perhubungan di Kota Bandung. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk menyediakan layanan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, serta mengembangkan sistem transportasi di Kota Bandung yang meliputi transportasi darat, lalu lintas, dan angkutan umum. Pelayanan ini mencakup pengelolaan infrastruktur transportasi, peningkatan keselamatan berlalu lintas, pengembangan kebijakan transportasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem transportasi cerdas dan terintegrasi.

Perkembangan pesat Kota Bandung sebagai salah satu pusat perekonomian, pendidikan, dan pariwisata nasional menuntut pelayanan transportasi yang lebih baik, efisien, dan ramah lingkungan. Namun, tantangan seperti pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, kemacetan lalu lintas, serta kebutuhan transportasi publik yang memadai masih menjadi isu utama yang perlu ditangani. Oleh karena itu, pemetaan terhadap kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta capaian kinerja Dinas Perhubungan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif.

Bab ini juga akan menguraikan kondisi organisasi Dinas Perhubungan, sumber daya pendukung, dan capaian kinerja selama periode sebelumnya. Selain itu, akan disajikan gambaran menyeluruh terkait pelayanan yang telah diberikan, termasuk identifikasi hambatan dan potensi yang ada. Dengan demikian, gambaran ini menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan strategis pada periode

2025-2029 untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Bandung.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup Perhubungan; dan
- b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Struktur ini mencakup berbagai bidang dan upt yang mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari:

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung



Sumber: Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
3. Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, terdiri atas:
 - a. Seksi Lalu Lintas Jalan;
 - b. Seksi Perlengkapan Jalan.
4. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
 - a. Seksi Manajemen Angkutan;
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Alat Penerangan Jalan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
6. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri atas:
 - a. Seksi Ketertiban Transportasi;
 - b. Seksi Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Jalan.
7. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:

- a. UPT Pengelolaan Terminal;
- c. BLUD Pengelolaan Perparkiran;
- d. BLUD Pengelolaan Angkutan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan struktur organisasi yang jelas dan terorganisir, Dinas Perhubungan Kota Bandung diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Struktur ini mendukung implementasi kebijakan serta koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Bandung.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

- a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor (S-3)	-
2	Pasca Sarjana (S-2)	27
3	Sarjana (S-1)	109
4	Diploma (D-3)	39
5	Diploma (D-2)	2
6	Diploma (D-1)	-
7	SLTA	87
8	SLTP	6
9	SD	2
	Jumlah	272

- b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	8
2	III	179
3	II	85
4	I	-
	Jumlah	272

c. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Esselon II B (Kepala Dinas)	1
2	Esselon III A (Sekretaris)	1
3	Esselon III B (Kepala Bidang)	4
4	Esselon IV A (Kassubag/Kasie/Ka. UPT)	12
5	Esselon IV B (Kassubag TU UPT)	3
	Jumlah	21

Sebagai upaya peningkatan kualitas SDM, Dinas Perhubungan Kota Bandung secara berkala menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, seperti pelatihan manajemen lalu lintas, keselamatan transportasi, serta pengembangan teknologi informasi di sektor perhubungan. Hal ini bertujuan agar aparatur dapat memberikan pelayanan yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Bandung didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang yang menjadi bagian penting dalam operasional sehari-hari. Sarana pendukung ini meliputi:

1. Kantor Operasional dan Unit Pelayanan Teknis (UPT):
 - o Kantor pusat Dinas Perhubungan Kota Bandung yang menjadi pusat administrasi dan kebijakan.
 - o Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa lokasi untuk mendukung operasional lapangan, seperti terminal, angkutan, dan parkir.
2. Sarana Transportasi Operasional:
 - o Kendaraan dinas operasional, termasuk mobil patroli lalu lintas, kendaraan derek, kendaraan PJU PJL, kendaraan ATCS, kendaraan perlengkapan jalan, kendaraan uji keliling
 - o Sepeda motor operasional untuk mendukung mobilitas petugas di lapangan.
3. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- Lampu lalu lintas (traffic light), rambu-rambu jalan, marka jalan, serta fasilitas penyebrang jalan seperti JPO dan zebra cross.
 - Area parkir on-street yang dikelola Dinas Perhubungan.
 - Terminal angkutan umum yang berfungsi sebagai simpul transportasi publik.
4. Teknologi Informasi dan Sistem Pendukung:
- Penerapan teknologi berbasis smart transportation system (ITS) seperti ATCS (Area Traffic Control System) untuk pengendalian lalu lintas secara real-time.
 - CCTV yang tersebar di beberapa persimpangan untuk pemantauan arus lalu lintas dan edukasi tertib lalu lintas.
 - Aplikasi layanan transportasi publik untuk memberikan informasi terkait jadwal dan rute transportasi.

Meskipun telah memiliki berbagai sarana pendukung, Dinas Perhubungan Kota Bandung masih menghadapi tantangan dalam pemeliharaan, peningkatan, dan modernisasi fasilitas yang ada. Oleh karena itu, optimalisasi sarana dan prasarana akan terus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi inovatif serta peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan.

Dengan dukungan SDM yang berkualitas dan sarana yang memadai, Dinas Perhubungan Kota Bandung diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik di sektor perhubungan, menjawab tantangan mobilitas perkotaan, dan mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran mobilitas penduduk, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, serta menciptakan sistem transportasi yang

aman, nyaman, dan berkelanjutan. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek transportasi darat, pengelolaan lalu lintas, angkutan umum, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung sistem transportasi cerdas.

A. Pelayanan Transportasi Darat

Pelayanan transportasi darat menjadi fokus utama Dinas Perhubungan Kota Bandung mengingat tingginya mobilitas penduduk dan kepadatan arus lalu lintas di kawasan perkotaan. Beberapa layanan yang diselenggarakan antara lain:

1. Pengelolaan Terminal Angkutan Umum:

- Pengaturan dan pengawasan operasional terminal sebagai simpul pergerakan transportasi publik.
- Fasilitasi layanan bagi pengguna angkutan umum untuk memastikan kenyamanan dan keamanan.

2. Manajemen Parkir:

- Penyelenggaraan layanan parkir di kawasan publik, baik on-street maupun off-street.
- Penerapan teknologi parkir elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan parkir.

3. Pengelolaan Angkutan umum massal:

- Pengoperasian angkutan umum massal bus Trans Metro Bandung dan bus sekolah.

B. Pelayanan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

Dalam upaya meningkatkan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan beberapa layanan, antara lain:

1. Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas:

- Penyusunan kebijakan rekayasa lalu lintas seperti pengaturan jalan satu arah, penutupan persimpangan tertentu, serta pelebaran jalan.
- Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas secara real-time melalui koordinasi lampu lalu lintas.

2. Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas:
 - Pemasangan dan pemeliharaan traffic light, rambu-rambu jalan, marka jalan, dan fasilitas keselamatan pejalan kaki.
 - Pemasangan CCTV dan papan informasi elektronik (Variable Message Sign/VMS) di titik-titik strategis untuk mendukung keselamatan pengguna jalan.
3. Penegakan Hukum dan Edukasi Keselamatan Lalu Lintas:
 - Pelaksanaan operasi gabungan untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan berlalu lintas.
 - Edukasi dan kampanye keselamatan jalan bagi masyarakat, termasuk sekolah-sekolah dan komunitas pengemudi.

C. Pelayanan Angkutan Umum

Dinas Perhubungan Kota Bandung berupaya meningkatkan kualitas layanan angkutan umum sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Layanan ini meliputi:

1. Pengembangan Angkutan Massal:
 - Pengawasan dan pembinaan terhadap operasional angkutan umum perkotaan, seperti angkot, bus kota, dan transportasi berbasis daring.
 - Dukungan terhadap pengembangan angkutan massal berbasis jalan seperti Trans Metro Bandung dan rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT).
2. Integrasi Layanan Transportasi Publik:
 - Perencanaan sistem transportasi yang terintegrasi antar moda untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat.
 - Penerapan tiket elektronik (e-ticketing) untuk angkutan umum dalam rangka mendukung pelayanan yang efisien dan modern.
3. Pengawasan Standar Pelayanan Angkutan:
 - Pengendalian terhadap tarif angkutan umum agar sesuai dengan standar pelayanan minimum.

- Monitoring kelaikan kendaraan angkutan umum melalui uji kir dan pengawasan teknis berkala.

D. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Transportasi

Dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi, Dinas Perhubungan Kota Bandung memanfaatkan inovasi teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan guna meningkatkan efektivitas manajemen transportasi. Inovasi yang dikembangkan antara lain:

1. Sistem Informasi Transportasi:
 - Pemanfaatan smart transportation system untuk pengelolaan lalu lintas dan pemantauan kondisi jalan.
 - Aplikasi layanan publik untuk memberikan informasi jadwal, rute, dan ketersediaan angkutan umum kepada masyarakat.
2. Sistem Pengawasan Digital:
 - Penggunaan teknologi CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas.
3. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Teknologi:
 - Penerapan sistem pengawasan kinerja transportasi melalui platform digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.

Selanjutnya pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD pada Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pada akhirnya pencapaian kinerja 2021 s/d 2025 mencakup penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, maupun capaian kinerja, IKK dan target indikator lainnya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)			(11)	(16)			(17)	(18)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	83,50	85,00	85,50	85,75	83,29	84,40	85,05	85,72	-	101,57%	101,08%	100,06%	100,26%	-
2	Persentase Tingkat Pelayanan Jalan	79,13	85,22	92,17	-	-	79,13	85,22	92,17	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
3	Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	-	-	-	7,58%	16,27%	-	-	-	7,70%	-	-	-	-	98,42%	-
4	Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	-	-	-	-	23,239%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	-	-	-	1 : 3,601	-	-	-	-	1 : 3,350	-	-	-	-	106,97%	-
6	Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	-	-	-	0,885	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	87,01%	-
7	Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	-	-	-	6,500	-	-	-	-	8,800	-	-	-	-	64,62%	-
8	Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	-	-	-	36,58%	-	-	-	-	36,24%	-	-	-	-	99,07%	-

E. Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021-2025

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2021-2025 yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah urusan perhubungan di Kota Bandung, berikut disampaikan analisis terhadap enam indikator utama:

1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021–2024 selalu berada di atas 100% (2021 = 101,57%; 2022 = 101,08%; 2023 = 100,06%; 2024 = 100,26%). Hal ini menunjukkan bahwa target pelayanan publik secara konsisten tercapai dan kualitas pelayanan berada dalam kategori sangat baik, meskipun tetap diperlukan perbaikan berkelanjutan agar capaian kinerja terus meningkat.

2) Persentase Tingkat Pelayanan Jalan

Capaian kinerja Persentase Tingkat Pelayanan Jalan pada Tahun 2021–2023 selalu berada di angka 100% (2021 = 100,00%; 2022 = 100,00%; 2023 = 100,00%). Hal ini menunjukkan bahwa target pelayanan jalan berhasil dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Konsistensi capaian ini menggambarkan adanya kesesuaian antara target dengan realisasi di lapangan, sehingga kondisi pelayanan jalan dapat dikategorikan baik. Meskipun demikian, tetap diperlukan evaluasi berkala dan peningkatan kualitas infrastruktur agar pelayanan jalan lebih optimal dan mampu menjawab dinamika kebutuhan transportasi di masa mendatang.

3) Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan

Target penurunan kemacetan Tahun 2024 ditetapkan sebesar 7,58%, dan realisasinya sebesar 7,70%, dengan rasio capaian 98,42%. Capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja pengurangan kemacetan sudah cukup efektif, meskipun ada ruang

peningkatan untuk efisiensi strategi manajemen lalu lintas yang lebih tepat sasaran.

4) Rasio Pengguna Angkutan Umum vs Pengguna Angkutan Pribadi

Target rasio tahun 2024 adalah 21,735%, dan capaian realisasinya adalah 22,990%, yang berarti rasio capaian mencapai 105,77%. Artinya, penggunaan angkutan umum meningkat lebih baik dari yang ditargetkan, meskipun perbandingannya masih menunjukkan dominasi angkutan pribadi. Hal ini merupakan indikasi bahwa strategi peningkatan minat terhadap angkutan umum mulai menunjukkan dampak positif.

5) Indeks Fatalitas per 10.000 Kendaraan

Indeks fatalitas Tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,885, sementara realisasi yang tercapai adalah 1,000, sehingga rasio capaian hanya 87,01%. Ini menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan yang menyebabkan fatalitas masih melebihi batas ideal, dan perlu upaya lebih intensif dalam membangun budaya berkendara aman dan penegakan hukum lalu lintas.

6) Indeks Fatalitas per 100.000 Penduduk

Target indikator ini di Tahun 2024 adalah 6,500, tetapi realisasi menunjukkan angka 8,800, yang menghasilkan rasio capaian sebesar 64,62%. Ini adalah salah satu indikator dengan capaian terendah, mengindikasikan masih tingginya risiko kecelakaan lalu lintas fatal. Perlu langkah strategis dan kolaboratif antara pemda, kepolisian, dan masyarakat dalam meningkatkan keselamatan berkendara.

7) Persentase Konektivitas Jalan yang Sudah Terlayani Angkutan Umum

Target tahun 2024 sebesar 36,58%, dengan capaian 36,24%, atau sekitar 99,07% dari target. Ini menunjukkan bahwa konektivitas layanan angkutan umum telah hampir sesuai dengan target yang direncanakan, namun masih perlu upaya pemenuhan terutama pada jalur-jalur pinggiran dan kawasan baru.

Kesimpulan:

Dari enam indikator yang dianalisis, empat di antaranya menunjukkan rasio capaian di atas 98%, yang menandakan kinerja relatif baik. Namun, dua indikator yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas masih menunjukkan capaian yang rendah, yaitu indeks fatalitas, baik per kendaraan maupun per jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan perlunya penajaman strategi dan program pada aspek keselamatan transportasi, selain melanjutkan keberhasilan dalam peningkatan layanan angkutan umum dan pengurangan kemacetan.

Tabel TC-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	87.315.053.156	159.954.371.522	147.667.371.382	147.403.986.649	131.900.095.211	82.313.629.416	150.474.237.625	122.380.850.450	130.013.100.192	-	94,27%	94,07%	82,88%	88,20%	0,00%
Program Pengelolaan Perkeretaapian	-	191.608.100	410.991.320	-	-	-	178.937.800	280.194.000	-	-	-	93,39%	68,18%	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88.698.139.144	95.618.674.575	100.721.070.369	104.064.241.632	112.383.146.324	59.680.016.894	73.703.090.908	71.487.999.200	74.024.816.172	-	67,28%	77,08%	70,98%	71,13%	0,00%

F. Analisis Anggaran dan Realisasi Program Prioritas Tahun 2021–2025

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp87,32 miliar dengan realisasi sebesar Rp82,31 miliar atau mencapai 94,27% dari total pagu. Pada tahun 2022, pagu anggaran meningkat signifikan menjadi Rp159,95 miliar dengan realisasi sebesar Rp150,47 miliar atau 94,07%.

Memasuki tahun 2023, pagu anggaran menurun menjadi Rp147,67 miliar, sementara realisasi mencapai Rp122,38 miliar atau 82,87%, yang menunjukkan adanya penurunan tingkat serapan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, pagu anggaran relatif stabil sebesar Rp147,40 miliar, dengan realisasi Rp130,01 miliar atau 88,22%.

Selanjutnya, pada tahun 2025, alokasi pagu kembali meningkat menjadi Rp131,9 miliar. Hingga periode pelaporan, data realisasi tahun 2025 belum tercatat secara final.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Program LLAJ selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik, meskipun terdapat variasi serapan anggaran pada tiap tahunnya, dengan kisaran realisasi antara 82,87% hingga 94,27%.

2. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Perkeretaapian mulai tercatat pada tahun 2022 dengan pagu sebesar Rp191,61 juta dan realisasi mencapai Rp178,94 juta, atau 93,38% dari total pagu. Pada tahun 2023, pagu meningkat menjadi Rp410,99 juta dengan realisasi sebesar Rp280,19 juta, atau 68,17%, yang menunjukkan adanya penurunan serapan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, 2024, dan 2025 tidak terdapat alokasi anggaran untuk program ini. Dengan demikian, capaian realisasi Program Pengelolaan Perkeretaapian pada periode 2022–2023 menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran meningkat, tingkat serapan anggaran mengalami penurunan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada periode tahun 2021 hingga 2025, alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota cenderung mengalami peningkatan meskipun realisasi belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2021, pagu anggaran tercatat sebesar Rp88,70 miliar dengan realisasi Rp59,68 miliar, atau 67,29% dari pagu. Tahun 2022, pagu meningkat menjadi Rp95,62 miliar dengan realisasi Rp73,70 miliar, atau 77,08%.

Selanjutnya pada tahun 2023, pagu kembali naik menjadi Rp100,72 miliar, namun realisasi hanya mencapai Rp71,49 miliar, atau 70,95%. Pada tahun 2024, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp104,06 miliar dengan realisasi Rp74,02 miliar, atau 71,13%. Untuk tahun 2025, pagu kembali ditetapkan sebesar Rp112,38 miliar, sementara data realisasi belum tercatat.

Secara keseluruhan, tren alokasi anggaran program ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian realisasi relatif masih berkisar antara 67% hingga 77% dari total pagu. Hal ini mengindikasikan perlunya optimalisasi serapan anggaran agar pelaksanaan program dapat lebih efektif dan efisien.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan transportasi yang diselenggarakan oleh Dishub. Kelompok ini dibagi berdasarkan jenis layanan dan kepentingannya terhadap sistem transportasi kota, sebagai berikut :

1. Masyarakat Umum (Pengguna Jalan dan Transportasi)
2. Pengguna Angkutan Umum
3. Pelajar dan Mahasiswa
4. Wisatawan dan Pengunjung Kota
5. Pelaku Usaha dan UMKM
6. Pengemudi dan Operator Transportasi

Berikut rincian kelompok sasaran layanan Dinas perhubungan Kota Bandung :

Kelompok Sasaran	Penjelasan
Masyarakat Umum	Warga Kota Bandung yang menggunakan fasilitas jalan, transportasi umum, parkir, jalur sepeda, dan zebra cross.
Pengguna Angkutan Umum	Penumpang Trans Metro Bandung (TMB), BANDROS, Bus Sekolah, dan angkutan perkotaan lainnya
Pelajar dan Mahasiswa	Penerima manfaat Bus Sekolah dan program keselamatan lalu lintas di sekolah
Wisatawan	Pengguna layanan BANDROS dan fasilitas transportasi wisata lainnya
Pengemudi dan Operator Transportasi	Sopir angkot, bus, ojek, dan mitra transportasi daring yang menggunakan layanan uji KIR, perizinan, pelatihan
Pelaku Usaha dan UMKM	Pengguna layanan distribusi barang, parkir usaha, dan fasilitas akses transportasi komersial

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki peran strategis dalam mengelola sistem transportasi kota yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat berbagai permasalahan yang harus diidentifikasi untuk mendukung perencanaan kebijakan yang lebih efektif. Identifikasi permasalahan ini mencakup aspek kelembagaan, pelayanan, serta sumber daya yang tersedia.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1. Ketidakseimbangan antara Kebutuhan dan Kapasitas Transportasi
Permintaan transportasi yang meningkat tidak sebanding dengan kapasitas jalan dan sarana transportasi yang ada, mengakibatkan ketidakseimbangan yang berujung pada kemacetan dan penurunan kualitas layanan transportasi publik.
2. Keterbatasan Regulasi dalam Pengelolaan Transportasi
Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebutuhan transportasi modern, seperti transportasi daring, kendaraan listrik, dan kebijakan parkir berbasis digital.
3. Tingkat Kepatuhan Pengguna Jalan yang Masih Rendah
Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih menjadi tantangan, yang berakibat pada tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya.
4. Belum Optimalnya Integrasi Moda Transportasi
Keterhubungan antar moda transportasi, seperti angkot, bus kota, dan kereta api, masih belum optimal, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna transportasi umum.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem transportasi masih perlu ditingkatkan, termasuk penguasaan teknologi untuk mendukung sistem transportasi berbasis digital.
6. Kurangnya Infrastruktur Pendukung Transportasi Publik

Fasilitas pendukung, seperti halte, trotoar, dan jalur khusus bagi transportasi umum serta kendaraan ramah lingkungan, masih belum memadai untuk mendukung mobilitas yang lebih baik. Faktor yang mempengaruhinya salah satunya yaitu Vandalisme dan Tuna Wisma di beberapa Halte Trans Metro Bandung.

7. Besarnya Tingkat Penggunaan Kendaraan Pribadi
faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman
8. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya
Faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Adapun pengelompokan permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

No	Uraian masalah	Pengelompokan masalah		
		Pencapaian kinerja IKU/IKK	Isu KLHS	Penjaringan aspirasi (masalah PD)
1	Ketidakseimbangan antara Kebutuhan dan Kapasitas Transportasi	√		
2	Keterbatasan Regulasi dalam Pengelolaan Transportasi			√
3	Tingkat Kepatuhan Pengguna Jalan yang Masih Rendah			√
4	Belum Optimalnya Integrasi Moda Transportasi		√	
5	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi			√
6	Kurangnya Infrastruktur Pendukung Transportasi Publik		√	
7	Besarnya Tingkat Penggunaan Kendaraan Pribadi	√		
8	Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya	√		

Dengan memahami permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelayanan serta memastikan bahwa sistem transportasi kota dapat berjalan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama tahun 2024 teridentifikasi sebanyak 115 ruas jalan dengan status jalan beragam mulai dari kolektor primer, kolektor sekunder dan arteri sekunder dengan kondisi 32 ruas jalan berada di zona macet, data selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini

Level of Service	Titik	%
A	-	0,00%
B	14	12,17%
C	69	60,00%
D	28	24,35%
E	4	3,48%
TOTAL	115	100

Tingkat pelayanan jalan menunjukkan kondisi macet tidaknya suatu ruas jalan. Suatu ruas jalan dikategorikan macet apabila tingkat pelayanan jalannya berada di tingkat D, E ataupun F. Sedangkan sebaliknya suatu ruas jalan dikategorikan tidak macet apabila tingkat pelayanan jalannya berada di tingkat A, B atau paling rendah C.

Tingkat pelayanan jalan ditentukan oleh dua variabel / syarat penilaian yang terdiri dari v/c ratio (perbandingan antara volume dan kapasitas jalan) dengan batasan maks 0,8 dan kecepatan rata-rata tempuh dengan batasan minimal 21 km/jam.

Suatu ruas jalan yang dikategorikan macet mempunyai sejumlah aspek-aspek penyebab kemacetan (baik urusan perhubungan maupun urusan non perhubungan), apabila sejumlah aspek penyebab kemacetan dapat dihilangkan maka ruas jalan tersebut secara otomatis akan berangsur lancar / tidak macet.

Adapun aspek-aspek penyebab kemacetan yang menjadi urusan perhubungan terdiri dari :

1. Ngetem angkutan umum
2. Parkir on Street
3. Penyeberang jalan / Gerakan pejalan kaki
4. APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas) persimpangan
5. Disiplin pengemudi angkutan umum
6. Marka / rambu belum ada / kurang
7. U turn (putaran) kendaraan

Sedangkan aspek-aspek penyebab kemacetan yang menjadi urusan non perhubungan terdiri dari :

1. Aksesibilitas gang / jalan
2. Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / Pendidikan
3. Pasar tumpah
4. PKL
5. Banjir / genangan
6. Kualitas / kondisi infrastruktur jalan
7. Perlintasan sebidang kereta api
8. Volume lalu lintas yang tinggi

Jumlah aspek penyebab kemacetan yang menjadi urusan perhubungan sebanyak 135 aspek dari 805 aspek yang teridentifikasi. Jumlah aspek penyebab kemacetan yang menjadi urusan non perhubungan sebanyak 93 aspek dari 920 aspek yang teridentifikasi

Yang menjadi dasar penentuan aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan adalah hasil survey di lapangan.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Perhubungan

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Kota Bandung yang diimplementasikan dalam Visi Kota Bandung yaitu “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM Mendukung Pembangunan Nasional” ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu “Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan” maka salah satu tugas Dinas Perhubungan kota Bandung yang terkait dengan visi Kota Bandung tersebut adalah ikut serta mewujudkan sistem transportasi Kota Bandung yang unggul, tangguh dan maju guna membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait visi Kota Bandung tersebut yaitu “Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perhubungan dan Juga Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang” diarahkan untuk terwujudnya kota Bandung yang unggul, tangguh dan maju di bidang transportasi dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah harus didukung dan misi yang baik dari Kepala Daerah, adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul.
2. Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif.
4. Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
5. Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran.

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok nya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang unggul dan tangguh dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah kota Bandung dengan konsep maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan dan meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar mobilitas penduduk kota, aksesibilitas sarana dan prasarana jalan, manajemen kebutuhan lalu-lintas dan keselamatan berlalu-lintas meningkat.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan misi Kota Bandung diantaranya :

- Tidak seimbang nya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.
- Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.

- Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
- Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun traffic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di jalan.
- Peralatan software maupun hardware ATCS yang sudah tua sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi yang berimbas pada kualitas layanan traffic light.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mewujudkan visi misi Kota Bandung yaitu :

- Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi.
- Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam pengadaan bus sehingga membantu kelancaran pengoperasian Trans Metro Bandung.
- Adanya bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk up grading ATCS sehingga ikut membantu pelayanan traffic light di Kota Bandung.

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai sasaran prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat;

2. Meningkatnya kecukupan dan keandalan penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas dan kinerja layanan;
3. Pemenuhan kebutuhan jumlah, kesesuaian kompetensi, serta penyebaran SDM aparatur perhubungan darat agar mampu menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan dengan baik dan benar;
4. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat yang berkelanjutan;
5. Terwujudnya transportasi darat yang berkeadilan, yang menjangkau seluruh wilayah NKRI, terjangkau oleh semua golongan ekonomi dan sosial, terutama oleh kaum berkebutuhan khusus dan responsif gender;
6. Meningkatnya penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di bidang transportasi darat;
7. Pengembangan transportasi darat yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
8. Meningkatnya ketersediaan regulasi di bidang Perhubungan Darat.

Adapun sasaran strategis/program Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Memperkuat konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat;
2. Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat;
3. Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan;
4. Meningkatnya kualitas dan kinerja sdm di bidang perhubungan darat
5. Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan;

6. Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan;
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan DITJEN Perhubungan Darat.

Selain mengacu pada Renstra K/L, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga menyesuaikan dengan kebijakan dan program yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Barat, yang mencakup:

1. Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi
Pengembangan sistem transportasi yang terhubung antar-kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
2. Penguatan Sistem Transportasi Umum
Meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum dalam mendukung pergerakan masyarakat.
3. Penerapan Kebijakan Transportasi Ramah Lingkungan
Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan sistem transportasi rendah emisi.
4. Digitalisasi Sistem Transportasi
Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi layanan transportasi, termasuk sistem e-ticketing dan pengelolaan parkir berbasis digital.

Point yang menjadi keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu peningkatan pelayanan transportasi. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya sementara ada beberapa SDM yang akan memasuki masa pensiun ataupun mutasi ke instansi lain. Sementara untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu adanya koodinasi yang cukup baik pada pelaksanaan menghadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat penting dalam perencanaan pembangunan transportasi di Kota Bandung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan sistem transportasi sejalan dengan arah kebijakan tata ruang serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dari ketujuh sumber tersebut didapatkan isu *longlist* yang kemudian disities menjadi 8 isu pembangunan berkelanjutan strategis Kota Bandung, yaitu :

- 1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali
- 2) Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang memadai
- 3) Kurang optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dan hulu ke hilir
- 4) Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.
- 5) Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata
- 6) Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
- 7) Belum optimalnya pembangunan sektor dan sumber daya ekonomi yang inklusif
- 8) Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi *good governance*, dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Delapan isu pembangunan berkelanjutan strategis kemudian dilihat keterkaitannya dengan isu strategis pada dokumen RPJPD Kota Bandung 2025-2045, Rantek RPJMD Kota Bandung 2025-2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan antar isu strategis.

Selain itu diketahui juga antar isu strategis KLHS RPJMD Kota Bandung 2025-2029 memiliki pengaruh timbal balik. Hubungan timbal balik menunjukkan bahwa suatu isu dapat saling memengaruhi satu sama lain.

Kesesuaian dengan RTRW Kota Bandung

1. Pengembangan Infrastruktur Transportasi Berbasis Tata Ruang
Penyesuaian pembangunan jalan, terminal, dan fasilitas transportasi lainnya dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.
2. Integrasi Transportasi dengan Kawasan Perkotaan
Pengembangan transportasi yang mendukung kawasan permukiman, bisnis, dan industri secara efisien.

Kesesuaian dengan KLHS

1. Dampak Lingkungan Transportasi
Kajian terhadap dampak emisi, polusi suara, serta penggunaan lahan akibat pembangunan transportasi.
2. Penerapan Transportasi Berkelanjutan
Mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan pengembangan jalur pedestrian serta sepeda guna mengurangi emisi karbon.
3. Integrasi Perencanaan Transportasi dengan Tata Ruang
Mendorong pengembangan kawasan berbasis TOD (Transit Oriented Development) yang memadukan hunian, komersial, dan simpul transportasi massal sebagai upaya penanganan kemacetan.
Dengan mempertimbangkan RTRW dan KLHS, pembangunan transportasi di Kota Bandung dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

4. Isu Strategis Dinas Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Bandung, Dinas Perhubungan perlu merumuskan isu-isu strategis yang menjadi prioritas selama periode perencanaan 2025–2029. Penetapan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan daerah, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta dinamika lingkungan strategis baik secara global, nasional, maupun regional. Selain itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi dasar dalam memformulasikan isu-isu utama yang perlu ditangani oleh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis, isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung antara lain:

1. Tingginya tingkat kemacetan lalu lintas di sejumlah kawasan strategis kota akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
2. Rendahnya daya tarik dan keterjangkauan angkutan umum, yang berdampak pada tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
3. Belum optimalnya sistem transportasi aktif (pejalan kaki dan pesepeda) akibat keterbatasan infrastruktur yang mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna.
4. Keterbatasan integrasi sistem transportasi cerdas (ITS) dan teknologi manajemen lalu lintas berbasis data, yang menyebabkan rendahnya efisiensi dan kecepatan respon terhadap dinamika lalu lintas perkotaan.
5. Tingginya kontribusi sektor transportasi terhadap emisi karbon, yang berdampak langsung pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
6. Lemahnya penegakan aturan dan manajemen permintaan transportasi, termasuk pengelolaan parkir, kawasan tertib lalu lintas, dan pengawasan angkutan umum.
7. Ketimpangan akses transportasi antarwilayah di Kota Bandung, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah pinggiran kota.

Isu-isu strategis ini akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas Dinas Perhubungan Kota Bandung selama lima tahun mendatang. Penanganan isu dilakukan secara integratif dengan pendekatan kolaboratif antarsektor, pelibatan pemangku kepentingan, serta inovasi dalam tata kelola transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya jaringan jalan kota yang padat dan terhubung	Kemacetan lalu lintas di jam sibuk dan pusat aktivitas	Emisi gas rumah kaca dari transportasi	Perubahan iklim global akibat sektor transportasi	Penurunan kualitas udara kota	Pertumbuhan kendaraan bermotor	Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan efisien
Potensi angkutan umum massal seperti BRT dan angkot	Penurunan minat masyarakat terhadap angkutan umum	Efisiensi energi dan emisi kendaraan umum	Desakan transisi energi bersih	Kebutuhan transformasi moda transportasi publik	Ketimpangan akses transportasi di wilayah kota	Optimalisasi layanan angkutan umum berbasis kebutuhan masyarakat
Infrastruktur pejalan kaki dan jalur sepeda	Minimnya budaya berjalan kaki dan bersepeda	Kesehatan masyarakat & kualitas lingkungan hidup	Urbanisasi global dan mobilitas sehat	Dukungan terhadap mobilitas berkelanjutan	Keterbatasan ruang untuk non-motorized transport	Penguatan infrastruktur transportasi aktif (ramah pejalan kaki & pesepeda)
Data transportasi dan ITS (Intelligent Transport System)	Kurangnya integrasi sistem transportasi & manajemen lalu lintas	Tata kelola dan perencanaan transportasi berbasis data	Revolusi digital global	Implementasi SPBE dan smart city	Kesiapan SDM & infrastruktur teknologi	Pengembangan sistem transportasi cerdas dan berbasis digital
Dukungan regulasi daerah terhadap penataan transportasi	Lemahnya penegakan aturan parkir dan lalu lintas	Konsistensi kebijakan dan pengawasan	Tren global tata kelola kota berkelanjutan	Penguatan peran pemda dalam pengendalian lalu lintas	Koordinasi antarinstansi belum optimal	Reformasi kebijakan pengendalian lalu lintas & manajemen permintaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan

Tujuan ditetapkan renstra ini yaitu guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan yaitu dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi maka rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan renstra disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025–2029 merupakan rumusan hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai perwujudan dari tujuan perangkat daerah. Sasaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*), serta berorientasi pada penyelesaian isu strategis dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat.

Penyusunan sasaran strategis Dinas Perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Evaluasi kinerja periode sebelumnya,
- Isu-isu strategis dan tematik pembangunan sektor transportasi,
- Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS),
- Arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional (RPJMD Kota Bandung, RPJMN),
- Target indikator kinerja kunci (IKK), Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta indikator sektoral lainnya.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu:

1. Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel TC-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan menunjang daya saing kota serta ketahanan terhadap Bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Infrastruktur Transportasi	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	16,27%	15,40%	14,16%	12,42%	9,81%	
			Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum	23,239%	23,489%	23,739%	23,989%	24,239%	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,73	85,74	85,75	85,76	85,77	

3.3 Strategi Renstra Dinas Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan strategi pengembangan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang tersedia guna meningkatkan kualitas layanan transportasi. Berikut strategi renstra Dinas Perhubungan :

1. **Pengembangan Infrastruktur Transportasi Terpadu**
 - Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, termasuk jalan, terminal, halte, dan fasilitas pejalan kaki.
 - Mengembangkan sistem transportasi multimoda yang terintegrasi guna mempermudah mobilitas masyarakat.
2. **Penerapan Teknologi Transportasi Cerdas**
 - Mengimplementasikan sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi seperti Intelligent Traffic System (ITS) dan smart parking.
 - Mengembangkan platform digital untuk layanan transportasi publik, termasuk sistem pembayaran elektronik.
3. **Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas**
 - Melaksanakan rekayasa lalu lintas dan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi guna mengurangi kemacetan.
 - Meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi CCTV dan AI.
4. **Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Publik**
 - Mendorong peningkatan jumlah dan kualitas armada transportasi umum agar lebih aman, nyaman, dan terjangkau.
 - Mengembangkan sistem transportasi publik berbasis lingkungan seperti kendaraan listrik dan bus rapid transit (BRT).
5. **Penguatan Regulasi dan Koordinasi Antar Stakeholder**
 - Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan operator transportasi dalam perencanaan serta pengelolaan transportasi.
 - Menyusun kebijakan transportasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas.
6. **Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Transportasi**
 - Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan.
 - Mengembangkan program insentif bagi pengguna transportasi publik dan kendaraan listrik.
7. **Diversifikasi Sumber Pendanaan Transportasi**

- o Mengoptimalkan pendanaan melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dan kerja sama dengan sektor swasta.
- o Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran transportasi guna memastikan keberlanjutan program pengembangan.

Dengan strategi yang terarah dan terukur, Dinas Perhubungan Kota Bandung diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

Adapun penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan dalam Renstra Dinas Perhubungan kota Bandung disajikan dalam tabel berikut ini:

Tahap 1	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
1	2	3	4	5
Penguatan Regulasi dan Koordinasi Antar Stakeholder	Diversifikasi Sumber Pendanaan Transportasi	Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas	Pengembangan Infrastruktur Transportasi Terpadu	Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Publik
			Penerapan Teknologi Transportasi Cerdas	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Transportasi

Dalam menentukan strategi yang terarah dan terukur ini Dinas Perhubungan juga melakukan analisis terhadap lingkungan secara internal dan eksternal , sebagai berikut :

INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN	KODE PENYEBAB
Man	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aparatur dengan kompetensi teknis di bidang transportasi dan perhubungan. - Dukungan pegawai yang cukup berpengalaman dalam pelayanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya keterbatasan jumlah SDM dengan keahlian spesifik (misalnya traffic engineer, IT transportasi). - Rotasi pegawai sering menyebabkan kurangnya kontinuitas program. 	

Money	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan APBD Kota Bandung yang relatif stabil. - Adanya potensi dukungan dana dari pusat dan provinsi melalui program strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran dibanding kebutuhan sarana prasarana transportasi. - Belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif (CSR, KPBU). 	
Method	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SOP dan regulasi pendukung di sektor perhubungan. - Adanya sistem perencanaan berbasis Renstra dan kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SOP belum konsisten di semua bidang. - Inovasi metode manajemen transportasi belum maksimal (misalnya ITS, digitalisasi). 	
Machine	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sarana pendukung operasional seperti kendaraan dinas, peralatan ATCS, dan fasilitas terminal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian peralatan transportasi masih terbatas jumlahnya atau sudah usang. - Pemeliharaan prasarana belum optimal. 	
Material	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya infrastruktur transportasi yang relatif lengkap (jalan, terminal, halte, rambu lalu lintas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan kendaraan lebih cepat dibanding kapasitas infrastruktur. - Keterbatasan ruang kota untuk penambahan prasarana baru. 	

EKSTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN	KODE PENYEBAB
Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kebijakan nasional terkait smart city & transportasi berkelanjutan. - Adanya program pemerintah pusat & provinsi (BRT, LRT, elektrifikasi kendaraan). 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kebijakan pusat/daerah yang cepat. - Potensi tumpang tindih kewenangan antar-instansi. 	
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi lokal mendorong peningkatan layanan transportasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan APBD untuk transportasi publik. - Fluktuasi harga BBM memengaruhi operasional. 	

	- Peluang kemitraan swasta (KPBU, CSR).		
Sosial-Budaya	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transportasi ramah lingkungan. - Dukungan komunitas transportasi & akademisi di Bandung.	- Perilaku masyarakat masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi. - Resistensi terhadap perubahan kebijakan (contoh: pembatasan kendaraan).	
Lingkungan	- Dorongan global menuju green transportation & energi terbarukan.	- Tingginya polusi udara akibat pertumbuhan kendaraan.	
Alam	Adanya potensi wisata alam yang dapat dikombinasikan dengan layanan transportasi.	Kerentanan terhadap bencana alam (banjir, longsor) yang dapat mengganggu pelayanan transportasi	
IT	- Perkembangan ITS (Intelligent Transport System), big data, dan aplikasi digital transportasi. - Peluang integrasi dengan smart city Bandung.	- Kesenjangan infrastruktur digital di beberapa titik. - Perlu investasi besar dalam modernisasi sistem.	

Selain analisis terhadap lingkungan, Dinas Perhubungan juga melakukan analisis terhadap proses bisnis yang terkait dengan *cross cutting* dengan Instansi lainnya, sebagai berikut :

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Hubungan
1.	Pengelolaan Pasar dan PKL – Disdagin / Satpol PP	Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan pasar tradisional di tepi jalan menimbulkan penyempitan badan jalan dan kemacetan.
2.	Kegiatan Pendidikan - Dinas Pendidikan	Lokasi sekolah yang terkonsentrasi di area tertentu dengan waktu masuk/pulang serentak menimbulkan kepadatan lalu lintas.
3.	Kegiatan Pariwisata & Event Daerah – Disbudpar	Adanya event besar, wisata kuliner, atau destinasi pariwisata meningkatkan volume kendaraan di titik tertentu.

4.	Proyek Infrastruktur / Utilitas - DSDABM / PDAM / DPKP / PLN.	Pekerjaan galian jalan, pembangunan gedung, pembangunan taman atau perbaikan utilitas (air, listrik, gas, internet) menimbulkan penyempitan jalan dan kemacetan.
5.	Tata Ruang / Perizinan Bangunan - Disiptabintar / DPMPTSP	Pertumbuhan kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, dan perkantoran yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan menimbulkan kepadatan lalu lintas.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Untuk mendukung implementasi strategi pengembangan transportasi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Bandung merumuskan kebijakan yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program transportasi di Kota Bandung. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Berikut beberapa kebijakan Dinas Perhubungan :

1. Pengelolaan Lalu Lintas dan Pengurangan Kemacetan

Menerapkan manajemen lalu lintas berbasis teknologi dan kebijakan pembatasan kendaraan di koridor padat.

2. Penguatan Angkutan Umum

Meningkatkan kualitas, integrasi, dan aksesibilitas angkutan umum untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

3. Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Membangun dan memperbaiki fasilitas transportasi yang mendukung kenyamanan dan keterjangkauan bagi semua kalangan.

4. Transportasi Ramah Lingkungan

Mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi dan pengembangan fasilitas transportasi berkelanjutan seperti jalur sepeda.

5. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan

Memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi untuk menciptakan sistem transportasi yang aman bagi masyarakat.

6. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Mendorong digitalisasi layanan transportasi dan kolaborasi dengan pelaku industri teknologi.

Dengan kebijakan yang terarah dan terukur, diharapkan pengelolaan transportasi di Kota Bandung dapat semakin berkembang dan mampu menjawab tantangan mobilitas perkotaan secara efektif.

Untuk mewujudkan liveable city aspek transportasi melalui sasaran peningkatan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas dengan strategi dan arah kebijakan yang terinci pada tabel berikut:

No	Operasionalisasi NSPK	Arah kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra PD	Ket
1	Implementasi rekayasa lalu lintas	Menyusun kota yang terhubung, tertata dan resilien	Pengelolaan Lalu Lintas dan Pengurangan Kemacetan	
2	Penyusunan zonasi trayek dan ketentuan tarif inklusif		Penguatan Angkutan Umum	
3	Pemenuhan kebutuhan sarpras transportasi		Pengembangan Infrastruktur Transportasi	
4	Perluasan jalur sepeda		Transportasi Ramah Lingkungan	
5	Penegakan keselamatan berkendara		Peningkatan Keselamatan dan Keamanan	
6	Pengembangan teknologi ITS		Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala PD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang

penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas PD berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan RENSTRA PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Bandung, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel TC-27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian per tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025 (pagu murni)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Meningkatnya Kelayakhan Aspek Infrastruktur Transportasi	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	16,77%	16,27%	145.434.873.750,37	15,40%	147.242.060.631,71	14,16%	149.874.932.932,03	12,42%	152.571.149.173,50	9,81%	155.332.945.026,19	9,81%	750.455.961.513,80	Dinas Perhubungan
				Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	22,989%	23,239%		23,489%		23,739%		23,989%		24,489%		24,489%		
				Persentase aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan yang tertangani	0,50	0,50		0,870		1,240		1,740		2,610		2,610		
				Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	1 : 3,350	1 : 3,303	145.434.873.750,37	1 : 3,257	147.242.060.631,71	1 : 3,213	149.874.932.932,03	1 : 3,169	152.571.149.173,50	1 : 3,126	155.332.945.026,19	1 : 3,126	750.455.961.513,80	
				Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	1	0,960		0,921		0,883		0,845		0,806		0,806		

				Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	8,800	8,537		8,298		8,059			7,819		7,580		7,580	
				Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	36,240	36,241		36,247		36,253			36,259		36,265		36,265	
		2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	16 Dokumen	16 Dokumen	3.179.766.074,74	16 dokumen	3.154.526.498,90	20 dokumen	3.230.530.046,35	22 dokumen	3.308.455.343,42	24 dokumen	3.308.455.343,42	100 dokumen	3.308.455.343,42	Bidang Angkutan dan PKB
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi bidang perhubungan	16 Dokumen	16 Dokumen	3.179.766.074,74	16 dokumen	3.154.526.498,90	20 dokumen	3.230.530.046,35	22 dokumen	3.308.455.343,42	24 dokumen	3.308.455.343,42	100 dokumen	3.308.455.343,42	Bidang Angkutan dan PKB
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	7 Jenis	7 Jenis	90.575.598.139,28	7 Jenis	92.488.887.969,54	7 Jenis	93.993.447.987,62	7 Jenis	95.586.822.366,43	7 Jenis	95.586.822.366,43	0 dokumen	95.586.822.366,43	Bidang SPT
				Jumlah jenis prasarana jalan yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis				
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJL yang dibangun	4272 unit	4227	52.250.717.206,43	4300	51.835.974.137,36	4400	53.084.883.576,42	4500	54.365.371.689,35	4600	55.676.707.918,34	22027	267.213.654.527,90	Bidang SPT
				Jumlah halte yang dibangun	1 unit	20		25		25		25	25	25	120	0		

		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah halte yang dipelihara	6 unit	10		30		40		50		60		190	0		Bidang Latin PJ
				Jumlah titik ATCS yang dipelihara	146 titik	146 (titik APILL)	5.183.605.892,35	146	7.774.699.565,95	146	7.238.199.272,15	146	6.738.905.131,84	146	6.274.048.101,06	146	33.209.457.963,35		
		2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola (Lokasi)	9 Lokasi	9 Lokasi	5.871.746.552,38	8 Lokasi	5.160.189.807,07	8 Lokasi	4.804.106.163,70	8 Lokasi	4.472.716.826,82	8 Lokasi	4.164.183.938,62	8 lokasi	24.472.943.288,59		UPT Terminal
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal tipe C yang dipelihara	9 Lokasi	9 Lokasi	5.871.746.552,38	8 Lokasi	5.160.189.807,07	8 Lokasi	4.804.106.163,70	8 Lokasi	4.472.716.826,82	8 Lokasi	4.164.183.938,62	41 Lokasi	24.472.943.288,59		UPT Terminal
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang diuji	65000 unit	66000 unit	7.009.324.285,63	67000 unit	6.953.687.372,56	68000 unit	7.121.225.958,33	69000 unit	7.293.000.758,01	70000 unit	7.468.913.766,70	340000 unit	35.846.152.141,23		Bidang Angkutan dan PKB
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	747.833.622,72	1 Unit	741.897.650,62	1 Unit	759.772.553,03	1 Unit	778.099.422,52	1 Unit	796.867.802,97	1 Unit	3.824.471.051,86		Bidang Angkutan dan PKB
		2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor	6 Kegiatan	6 Kegiatan	74.696.520,37	6 Kegiatan	74.103.612,84	6 Kegiatan	75.889.027,66	6 Kegiatan	77.719.586,67	6 Kegiatan	79.594.244,99	6 Kegiatan	382.002.992,53		Bidang Angkutan dan PKB
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	12 Dokumen	3.257.059.482,42	12 Dokumen	3.231.206.385,95	12 Dokumen	3.309.057.419,22	12 Dokumen	3.388.876.916,13	12 Dokumen	3.470.619.336,46	12 Dokumen	16.656.819.540,18		Bidang Angkutan dan PKB

		2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	4 Laporan	1.920.221.703,64	4 Laporan	1.904.979.833,90	4 Laporan	1.950.877.443,04	4 Laporan	1.997.935.573,81	4 Laporan	2.046.127.377,02	20 Laporan	9.820.141.931,41	Bidang Angkutan dan PKB
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.009.512.956,48	1 Unit	1.001.499.889,25	1 Unit	1.025.629.515,39	1 Unit	1.050.369.258,87	1 Unit	1.075.705.005,26	1 Unit	5.162.716.625,25	Bidang Angkutan dan PKB
		2.15.02.2.06	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota</i>	<i>Laporan manajemen dan penataan rekayasa lalu lintas</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>965.506.751,82</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>957.842.986,53</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>980.920.765,36</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>1.004.582.065,81</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>1.028.813.388,37</i>	<i>28 Laporan</i>	<i>4.937.665.957,89</i>	<i>Bidang PO, Bidang Lalin PJ dan Bidang Angkutan PKB</i>
				<i>Laporan pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan Jalan Raya</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>		<i>4 Laporan</i>		<i>4 Laporan</i>		<i>5 Laporan</i>	<i>6 Laporan</i>		<i>23 Laporan</i>			
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	431.029.799,92	6 Laporan	427.608.476,13	6 Laporan	437.911.055,97	6 Laporan	448.474.136,52	6 Laporan	459.291.691,24	28 Laporan	2.204.315.159,78	Bidang Lalin PJ
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	534.476.951,90	4 Laporan	530.234.510,40	4 Laporan	543.009.709,40	5 Laporan	556.107.929,29	6 Laporan	569.521.697,14	23 Laporan	2.733.350.798,13	Bidang Angkutan dan PKB

		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	laporan Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan di Jalan Raya	4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	20 Laporan		Bidang Pengendalian dan Operasional	
				Laporan Pengaturan Lalu Lintas, kampanye publik ketertiban berlalu lintas dan pelaksanaan CFD	4 laporan	4 laporan	15.460.496.039,36	4 laporan	15.337.777.464,25	4 laporan	15.707.318.026,90	4 laporan	16.086.202.422,30	4 laporan	20 Laporan	16.474.214.485,15	79.066.008.437,96	
		2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penunhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penunhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, pengaturan lalu lintas, kampanye publik ketertiban berlalu lintas dan pelaksanaan CFD	4 laporan	4 laporan	13.201.672.304,05	4 laporan	13.096.883.272,07	4 laporan	13.412.432.876,61	4 laporan	13.735.961.152,57	4 laporan	20 Laporan	14.067.283.517,05	67.514.233.122,35	Bidang Pengendalian dan Operasional
		2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan penertiban parkir liar	4 laporan	4 laporan	2.258.823.735,31	4 laporan	2.240.894.192,18	4 laporan	2.294.885.150,29	4 laporan	2.350.241.269,73	4 laporan	20 Laporan	2.406.930.968,10	11.551.775.315,61	Bidang Pengendalian dan Operasional

				Jumlah pengguna bike sharing	7285 orang	3445		6667		6667		6667		6667	30.113			Bidang SPT	
				Pengadaan kendaraan operasional	2 unit	3 unit	3.699.892.729,96	3 unit	4.664.819.739,57	3 unit	5.066.739.490,51	3 unit	6.016.577.912,77	3 unit	5.391.124.105,47	4 unit	24.469.219.356,46		
		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4.612.018.859,14	4 Laporan	4.575.410.694,56	4 Laporan	4.685.648.298,83	5 Laporan	4.798.673.260,80	6 Laporan	4.914.421.096,25	4 laporan	23.586.172.209,58		Bidang Angkutan dan PKB
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat	85.72 Indeks	85.73 Indeks	123.915.215.308,63	85.74 Indeks	120.156.055.381,56	85.75 Indeks	122.304.596.013,25	85.76 Indeks	124.504.828.112,58	85.77 Indeks	126.758.576.082,71	85.77 Indeks	617.639.270.898,73		SEKRETARIAT & BLUD
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik	99,67%	99,70%		99,73%		99,76%		99,79%		99,82%		99,82%			SEKRETARIAT & BLUD
				Jumlah Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	1.423.100 Unit	2.740.507 Unit	123.915.215.308,63	1.684.853 Unit	120.156.055.381,56	1.758.900 Unit	122.304.596.013,25	1.841.123 Unit	124.504.828.112,58	1.918.288 Unit	126.758.576.082,71	1.918.288 Unit	617.639.270.898,73		SEKRETARIAT & BLUD
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,45	84,60		84,75		84,90		85,05		85,20		85,35			SEKRETARIAT & BLUD

		2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	554.051.470,83	5 laporan	635.875.502,30	5 laporan	665.904.145,90	5 laporan	696.821.849,80	5 laporan	728.621.235,36	25 Laporan	3.281.274.204,19	SEKRETA RIAT
		2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	554.051.470,83	5 laporan	635.875.502,30	5 laporan	665.904.145,90	5 laporan	696.821.849,80	5 laporan	728.621.235,36	25 Laporan	3.281.274.204,19	Subag Program
		2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	53.761.400.457,74	12 laporan	61.701.050.029,89	12 laporan	64.614.826.129,53	12 laporan	67.614.870.616,46	12 laporan	70.700.467.517,95	60 Laporan	318.392.614.751,57	Sekretariat
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 laporan	12 laporan	53.761.400.457,74	12 laporan	61.701.050.029,89	12 laporan	64.614.826.129,53	12 laporan	67.614.870.616,46	12 laporan	70.700.467.517,95	60 laporan	318.392.614.751,57	Subag Keuangan
		2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	2.801.956.921,47	12 laporan	2.996.502.302,75	12 laporan	2.924.054.218,26	12 laporan	2.851.193.174,19	12 laporan	2.778.036.114,03	60 Laporan	14.351.742.730,70	Sekretariat
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	836.821.801,50	3 Paket	894.923.985,44	3 Paket	873.286.915,96	3 Paket	851.526.513,55	3 Paket	829.677.704,09	15 paket	4.286.236.920,54	Subag Umpeg
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210 Orang	210 Orang	1.965.135.119,97	210 Orang	2.101.578.317,32	210 Orang	2.050.767.302,30	210 Orang	1.999.666.660,64	210 Orang	1.948.358.409,94	1050 orang	10.065.505.810,17	Subag Umpeg
		2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	5.583.534.754,98	12 laporan	5.971.210.557,39	12 laporan	5.826.841.315,08	12 laporan	5.681.649.157,18	12 laporan	5.535.867.120,01	60 Laporan	28.599.102.904,64	Sekretaris
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	1 paket	1 paket	184.495.261,42	1 paket	197.305.130,38	1 paket	192.534.775,71	1 paket	187.737.229,65	1 paket	182.920.192,38	5 paket	944.992.589,54	Subag Umpeg

			gan Bangunan Kantor	gan Bangunan Kantor yang Disediakan														
	2.15.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	184.495.261,42	11 Paket	197.305.130,38	11 Paket	192.534.775,71	11 Paket	187.737.229,65	11 Paket	182.920.192,38	55 paket	944.992.589,54	Subag Umpeg
	2.15.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	3.191.758.704,74	12 laporan	3.413.368.790,69	12 laporan	3.330.841.895,79	12 laporan	3.247.844.591,36	12 laporan	3.164.510.089,74	60 Laporan	16.348.324.072,32	Subag Umpeg
	2.15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.033.385.037,77	3 Paket	1.105.134.993,89	3 Paket	1.078.415.537,24	3 Paket	1.051.543.777,64	3 Paket	1.024.562.844,85	15 paket	5.293.042.191,39	Subag Umpeg
	2.15.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	399.743.516,64	12 Dokumen	427.498.495,41	12 Dokumen	417.162.629,13	12 Dokumen	406.767.847,63	12 Dokumen	396.330.834,74	60 dokumen	2.047.503.323,55	Subag Umpeg
	2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	274.681.482,08	12 laporan	293.753.157,75	12 laporan	286.650.926,07	12 laporan	279.508.211,13	12 laporan	272.336.477,14	60 laporan	1.406.930.254,17	Subag Umpeg
	2.15.01.2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	12 laporan	1.381.370.186,42	12 laporan	1.477.281.436,00	12 laporan	1.441.564.390,10	12 laporan	1.405.643.754,34	12 laporan	1.369.577.182,04	60 Laporan	7.075.436.948,90	Sekretaris
	2.15.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	699.799.019,52	2 Unit	748.387.442,14	2 Unit	730.293.267,28	2 Unit	712.095.954,25	2 Unit	693.824.710,11	10 unit	3.584.400.393,30	Subag Umpeg

		2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	3 paket	681.571.166,90	3 paket	728.893.993,86	3 paket	711.271.122,82	3 paket	693.547.800,08	3 paket	675.752.471,93	15 paket	3.491.036.555,59	Subag Umpeg
		2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	12 laporan	9.936.170.426,97	12 laporan	10.626.058.286,93	12 laporan	10.369.146.230,49	12 laporan	10.110.769.755,93	12 laporan	9.851.343.562,68	60 Laporan	50.893.488.263,00	Sekretaris
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.450.397,06	12 Laporan	12.245.420,66	12 Laporan	11.949.356,39	12 Laporan	11.651.604,52	12 Laporan	11.352.642,97	60 laporan	58.649.421,60	Subag Umpeg
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.548.191.020,61	12 Laporan	3.794.548.903,46	12 Laporan	3.702.806.007,29	12 Laporan	3.610.540.169,69	12 Laporan	3.517.899.479,18	60 laporan	18.173.985.580,23	Subag Umpeg
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.376.529.009,29	12 Laporan	6.819.263.962,82	12 Laporan	6.654.390.866,81	12 Laporan	6.488.577.981,71	12 Laporan	6.322.091.440,53	60 laporan	32.660.853.261,16	Subag Umpeg
		2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laaporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	12 laporan	7.536.330.215,43	12 laporan	8.059.592.448,35	12 laporan	7.864.731.248,26	12 laporan	7.668.759.324,63	12 laporan	7.471.991.216,31	60 Laporan	38.601.404.452,98	Sekretaris

		2.15.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	156 Unit	156 Unit	5.605.653.086,84	156 Unit	5.994.864.608,54	156 Unit	5.849.923.469,22	156 Unit	5.704.156.154,45	156 Unit	5.557.796.623,72	780 unit	28.712.393.942,77	Subag Umpeg
		2.15.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.277.655.816,59	1 Unit	1.366.365.973,44	1 Unit	1.333.330.591,68	1 Unit	1.300.106.905,76	1 Unit	1.266.748.240,34	5 unit	6.544.207.527,81	Subag Umpeg
		2.15.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	214 Unit	214 Unit	653.021.312,00	214 Unit	698.361.866,37	214 Unit	681.477.187,37	214 Unit	664.496.264,42	214 Unit	647.446.352,25	1070 unit	3.344.802.982,41	Subag Umpeg
		2.15.01.2.10	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>IKM pelayanan angkutan</i>	<i>85.72 indeks</i>	<i>85.73 indeks</i>	<i>8.618.578.435,07</i>	<i>85.74 indeks</i>	<i>7.734.065.750,32</i>	<i>85.75 indeks</i>	<i>7.651.009.136,93</i>	<i>85.76 indeks</i>	<i>7.552.382.353,78</i>	<i>85.77 indeks</i>	<i>7.439.561.101,14</i>	<i>85.77 indeks</i>	<i>38.995.596.777,24</i>	<i>BLUD</i>
				<i>IKM pelayanan parkir</i>	<i>85.72 indeks</i>	<i>85.73 indeks</i>	<i>33.741.822.439,72</i>	<i>85.74 indeks</i>	<i>20.954.419.067,62</i>	<i>85.75 indeks</i>	<i>20.946.519.198,70</i>	<i>85.76 indeks</i>	<i>20.922.738.126,27</i>	<i>85.77 indeks</i>	<i>20.883.111.033,18</i>	<i>85.77 indeks</i>	<i>117.448.609.865,49</i>	
		2.15.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Angkutan)	Jumlah pengguna layanan BLUD Angkutan	839.144 orang	839.144 orang	8.618.578.435,07	624.986 orang	7.734.065.750,32	636.761 orang	7.651.009.136,93	648.536 orang	7.552.382.353,78	660.311 orang	7.439.561.101,14	3.409.738 orang	38.995.596.777,24	BLUD angkutan
		2.15.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)	Jumlah pengguna layanan BLUD Parkir	1.423.100 unit	1.423.100 unit	33.741.822.439,72	847.058 unit	20.954.419.067,62	889.411 unit	20.946.519.198,70	933.882 unit	20.922.738.126,27	980.576 unit	20.883.111.033,18	5.074.026 unit	117.448.609.865,49	BLUD Parkir

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Seiring perubahan RPJMD maka Renstra Dinas Perhubungan pun menyesuaikan dalam penentuan beberapa indikator kerjanya.

Berdasarkan matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab III, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mendukung sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 dapat dilihat sesuai tabel di bawah ini.

Tabel TC-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(6)	(9)
1	Persentase Penurunan Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	16,77%	16,27%	15,40%	14,16%	12,42%	9,81%	9,81%
	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum	22,989%	23,239%	23,489%	23,739%	23,989%	24,239%	24,239%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,72	85,73	85,74	85,75	85,76	85,77	85,77

Penjabaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung dari mulai penetapan isu strategis sampai program kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ISU STRATEGIS
Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang khususnya masalah penanganan kemacetan
- TUJUAN : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi ramah lingkungan yang didukung infrastruktur yang berkualitas
- Sasaran
 - 1) Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan
Indikator :
 - a. Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan
 - b. Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Strategi
 - 1) Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan
Indikator :
 - c. Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan
 - d. Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Kebijakan
 1. Meningkatnya kualitas Lalu Lintas dan Angkutan
Indikator :
 - c. Persentase aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan yang tertangani
 - d. Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan
 - e. Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan
 - f. Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum
 - g. Rasio Pengguna Angkutan umum vs Pengguna Angkutan Pribadi

2. Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Indikator : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran.

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata, Wali Kota menetapkan sejumlah program prioritas sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi pembangunan kota. Program prioritas ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan perkotaan secara responsif, inovatif, serta berbasis data. Berikut beberapa program prioritas walikota yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan yaitu Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan Jalan Umum Penataan Transportasi Publik, Smart Parking dan Cashless Payment. Program-program prioritas tersebut telah di fasilitasi melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), 4 kegiatan, dan 4 sub kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan. Berikut tabel program prioritas walikota :

NO	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	KET
1	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan Jalan Umum Penataan Transportasi Publik, Smart Parking dan Cashless Payment	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Mengkaji Ulang Jalur Lalu Lintas Cipaganti-Sukajadi	
2				Pembangunan Prasarana Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Bandung Caang Utama: Pendataan, Pemeliharaan, Perbaikan, Penambahan PJU, dan Pola Kerjasama	
3				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Angkot Utama: Standardisasi, Rerouting, Metode Pembayaran Cashless	
4				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)	Penataan Zona Parkir, Juru Parkir, dan Smart Parking System (Digitalisasi)	

Adapun sub kegiatan prioritas yang mendukung asta cita sesuai hasil rakortek dengan Bappeda Propinsi Jawa Barat, Dishub Propinsi Jawa Barat dan Bapperida kota Bandung yaitu :

1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota
2. Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten / kota
3. Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe c (fasilitas utama dan penunjang)

Sub kegiatan tersebut mendukung 2 item asta cita yaitu ;

1. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui IKU Dinas Perhubungan

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja terukur yang menunjukkan sejauh mana program, kegiatan, dan pelayanan transportasi yang dilaksanakan telah mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, dengan indikator-indikator utama seperti pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kelayakhunian Aspek Infrastruktur Transportasi	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	16,27%	15,40%	14,16%	12,42%	9,81%
			Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum	23,239%	23,489%	23,739%	23,989%	24,239%
2		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,73	85,74	85,75	85,76	85,77

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. IKK menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa capaian program dan kegiatan selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional. IKK menjadi dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja salah satunya dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat berjalan secara efektif dan akuntabel, Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan target-target kinerja yang mengacu pada *Indikator Kinerja Kunci* (IKK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penetapan target IKK menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja perangkat

daerah serta memastikan keselarasan antara pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

IKK merupakan indikator minimal yang wajib dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan jenis urusan yang diselenggarakan. Dalam urusan perhubungan, IKK mencerminkan hasil yang diharapkan dari upaya peningkatan pelayanan transportasi publik, penurunan tingkat kemacetan, peningkatan keselamatan berlalu lintas, serta penguatan konektivitas wilayah.

Target-target IKK dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025–2029 ditetapkan berdasarkan Draft lampiran Kepmendagri terkait IKK Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE				TARGET TAHUN					KET
			2022	2023	2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,63	0,63	0,63	0,63	0,61	0,69	0,79	0,86	0,86	BRT beroperasi mulai 2026
2	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten / kota	%	15,38%	27,67%	36,81%	58,20%	66,56%	74,92%	83,28 %	91,64%	100,00 %	Terhadap kebutuhan s/d tahun 2030
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Data tidak tersedia di Dishub

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dokumen Rencana Strategis ini menguraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung (Renja) Tahun 2025 s/d 2029 dan menjadi acuan bagi Unit Kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sampai tahun 2029.
3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 s/d 2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPDJKMD) Tahun 2025 s/d 2029 khususnya sektor perhubungan.
4. Dinas Perhubungan Kota Bandung berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Kerja unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2025-2029, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung (Renja) Tahun 2025 s/d 2029.